

**RENCANA STRATEGIS  
(RENSTRA)  
TAHUN 2024-2026**



**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
(SATPOL PP)  
KABUPATEN LUMAJANG  
JL. JENDERAL HARIYONO NO. 160 TLP. /  
FAX. (0334) 887467**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan karunia-Nya kepada Keluarga Besar Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang, sehingga dapat diselesaikan kegiatan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2024-2026, sehingga demikian kedepan Satuan Polisi Pamong Praja merupakan aparat Penegak Peraturan Daerah. Hal ini juga sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2004

Disamping halter tersebut diatas, maka Satuan Polisi Pamong Praja juga merupakan Stabilitas di bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum di daerah. Oleh karena itu, tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja di lapangan adalah unsur Pembantu Bupati di bidang Penegakan Perda dan Keputusan Bupati serta membina ketentraman dan ketertiban umum di Kabupaten Lumajang, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja Kami yakin bahwa jajaran Pemerintah Kabupaten Lumajuang serta komponen masyarakat akan memberikan dukungan pada pelaksanaan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2024-2026, sehingga tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja akan berhasil dalam mendukung Rencana Pembangunan sesuai dengan tahapan-tahapan yang tersusun dan terencana dengan sebaik-baiknya.

Semoga Allah SWT selalu menunjukkan jalan yang terbaik pada semua anggota Satuan Polisi Pamong Praja beserta jajarannya dalam mengabdikan diri seusia dengan tugas pokok dan fungsinya dan dicatat sebagai amal ibadah yang baik.

Lumang, Mei 2023

Plt. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN LUMAJANG



SUNARDI, MP.  
NIP. 19651201 198903 1 012

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi .....	ii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1. 1 Latar Belakang.....	1
1. 2 Landasan Hukum .....	3
1. 3 Maksud Dan Tujuan .....	8
1. 4 Sistematika Penulisan .....	9
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....</b>	<b>11</b>
2. 1 Tugas, Fungsi, Dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah .....	11
2. 2 Sumber Daya Perangkat Daerah .....	13
2. 3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	17
2. 4 Kelompok Sasaran Layanan.....	22
2. 5 Mitra Perangkat Daerah Dalam Pemberian Pelayanan.....	23
2. 6 Dukungan BMD Dalam Pencapaian kinerja Perangkat Daerah.....	25
2. 7 Kerjasama Perangkat Daerah.....	25
<b>BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....</b>	<b>29</b>
3.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah.....	29
3.2 Isu-Isu Strategis.....	30
<b>BAB IV TUJUAN DAN SASARAN .....</b>	<b>31</b>
4.1. Tujuan dan Sasaran .....	31
4.2 Cascading Kinerja Perangkat Daerah.....	32
<b>BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....</b>	<b>44</b>
5.1 Strategi dan Arah Kebijakan .....	44
<b>BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN .....</b>	<b>46</b>
<b>BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....</b>	<b>81</b>
7.1 Penentuan target tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2024-2016.....	81
<b>BAB VIII PENUTUP .....</b>	<b>86</b>

# **FBAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan keleluasaan dan sebagian besar kewenangan kepada daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Seiring dengan berakhirnya kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Lumajang pada tanggal 20 September 2023, maka Pemerintah Kabupaten Lumajang berkewajiban untuk menyampaikan rencana strategis penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang baik tercermin dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban instansi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang baik tercermin dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban instansi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Perencanaan pembangunan adalah suatu proses pengambilan keputusan yang dilakukan secara terpadu bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dengan memanfaatkan dan memperhitungkan kemampuan sumber daya informasi, ilmu pengetahuan, dan teknologi, serta memperhatikan perkembangan global. Untuk maksud perencanaan tersebut sudah tentu diperlukan upaya yang tepat dalam mencapai hasil melalui pemahaman persoalan yang benar-benar nyata dan pada akhirnya mampu untuk diatasi dengan baik

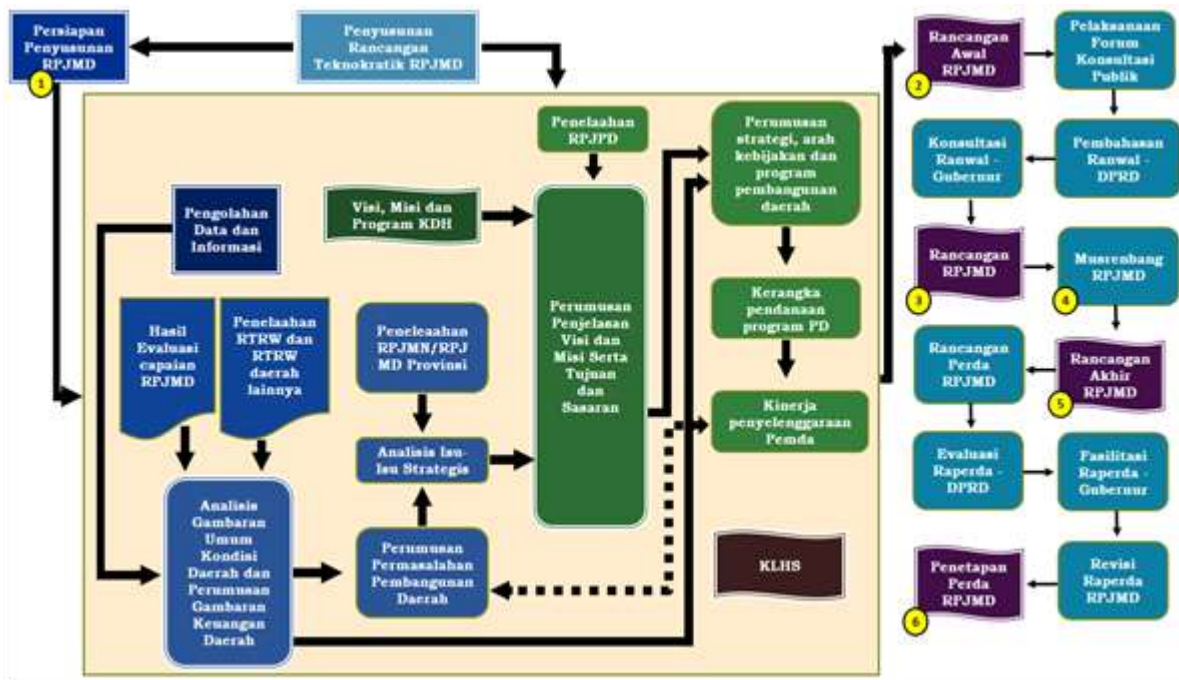
dan tepat sasaran setelah memandang melalui pendekatan menyeluruh.

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang sebagai salah satu instansi pemerintah daerah sesuai dengan bidang tugasnya membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintah di bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat, berkewajiban juga menyusun rencana strategis lima tahun ke depan, dengan harapan agar dapat menentukan arah perkembangan dalam meningkatkan kinerjanya, yang mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik lokal regional, nasional, maupun global.

Rencana strategis yang disusun merupakan langkah awal untuk melaksanakan mandat tersebut di atas, yang dalam penyusunannya perlu melaksanakan analisis terhadap lingkungan baik internal maupun eksternal dan merupakan langkah yang penting dengan memperhitungkan kekuatan (*strenghts*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*), dan tantangan (*threats*) yang ada. Rencana ini merupakan suatu proses yang berorientasi pada proses dan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun kedepan, dengan tetap memperhatikan potensi yang ada baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya alam, kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang dihadapi.

Dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 93 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang, untuk menyusun Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2024-2026 yang merupakan penjabaran RPD Kabupaten Lumajang Tahun 2024-2026.

**Gambar 1.1 Bagan Alir Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah**



## 1.2. Landasan Hukum

Penyusunan rancangan RPD Kabupaten Lumajang Tahun 2024-2026 didasarkan pada berbagai aspek konstitusional sebagai berikut:

1. Landasan idiil Pancasila
2. Landasan konstitusional Undang-Undang Dasar (UUD) 1945
3. Landasan operasional, antara lain:
  - a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 32);
  - b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor

- 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  - d. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  - e. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  - f. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  - g. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  - h. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  - i. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  - j. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas

Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

- k. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lemabran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- o. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang RTRWN;
- p. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;
- q. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
- r. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Negara;
- s. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019;
- t. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik-Bangkalan-Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo-Lamongan, Kawasan Bromo-Tengger-Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan;



- u. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
- v. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
- w. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- x. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 sebagai Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
- y. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
- z. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- aa. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam Penyusunan RPD;
- bb. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 tahun 2018 tentang Penerapan Standart Pelayanan:

- cc. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2018 tentang Standart Tekhnis Pelayanan Dasar Pada Standart Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota
- dd. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD);
- ee. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- ff. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- gg. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Desease 2019 di Lingkungan Pemerintahan Daerah;
- hh. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105 tahun 2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Untuk Pemerintah Daerah;
- ii. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementrian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah;
- jj. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 Dan Daerah Otonomi Baru
- kk. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 tahun 2020 tentang Hasil verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

- ll. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
- mm. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2033;
- nn. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2018 Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pupau-pulau kecil Provinsi Jawa Timur Tahun 2018-2038;
- oo. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur 2019-2024;
- pp. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 02 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lumajang Tahun 2012–2032;
- qq. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
- rr. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 10 Tahun 2018 tentang RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah) Kabupaten Lumajang 2005-2025;
- ss. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 93 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja
- tt. Peraturan Bupati Lumajangf Nomor Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2024 – 2026.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Rencana Strategis ini dikandung maksud untuk meningkatkan kinerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya untuk mencapai tujuan, sasaran dan program

yang telah ditetapkan dalam rangka mendukung visi daerah yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang. Adapun tujuan penyusunan renstra Satpol PP adalah:

1. Menjabarkan RPD Kabupaten Lumajang tahun 2024 – 2026 kedalam dokumen yang lebih operasional;
2. Menyediakan pedoman teknis operasional bagi setiap komponen Satpol PP Kabupaten Lumajang dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya;
3. Menyediakan pedoman teknis operasional bagi setiap komponen Satpol PP Kabupaten Lumajang dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya;
4. Menyediakan informasi berbagai program dan kegiatan Satpol PP yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahunan;
5. Menyediakan tolokukur kinerja bagi keberhasilan pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja secara keseluruhan

#### **1.4 SISTEMATIKA PENULISAN**

Penyusunan Renstra Satpol PP Kabupaten Lumajang 2024-2026 sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 52 Tahun 2022 menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut.

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

#### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN OPD**

- 2.1 Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Kelompok Sasaran Layanan
- 2.5 Mitra Perangkat Daerah Dalam Pemberian Pelayanan
- 2.6 Dukungan BUMD Dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah
- 2.7 Kerjasama Perangkat Daerah

### **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

- 3.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Isu Strategis

### **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

- 4.1 Tujuan dan Sasaran
- 4.2 Cascading Kinerja Perangkat Daerah

### **BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

### **BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

### **BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

- 7.1 Penentuan target Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2024-2026
- 7.2 Penentuan Target kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

### **BAB VIII PENUTUP**

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 93 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang memiliki kedudukan, tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi sebagai berikut.

#### **2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Satuan Perangkat Daerah**

##### **a. Tugas Pokok Satuan Polisi pamong Praja**

- Satpol PP mempunyai tugas pokok menegakan Perda, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati, serta menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
- Mengikuti proses penyusunan Perda serta kegiatan pembinaan dan penyebarluasan Perda, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
- Membantu pengamanan dan pengawalan tamu *Very Very Important Person* (VVIP) termasuk pejabat Negara dan tamu negara;
- Pelaksanaan pengamanan aset sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati;
- Membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah dan/atau kegiatan yang berskala besar; dan
- Pelaksanaan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **b. Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja**

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Nomor 93 Tahun 2021, Satpol PP mempunyai fungsi:

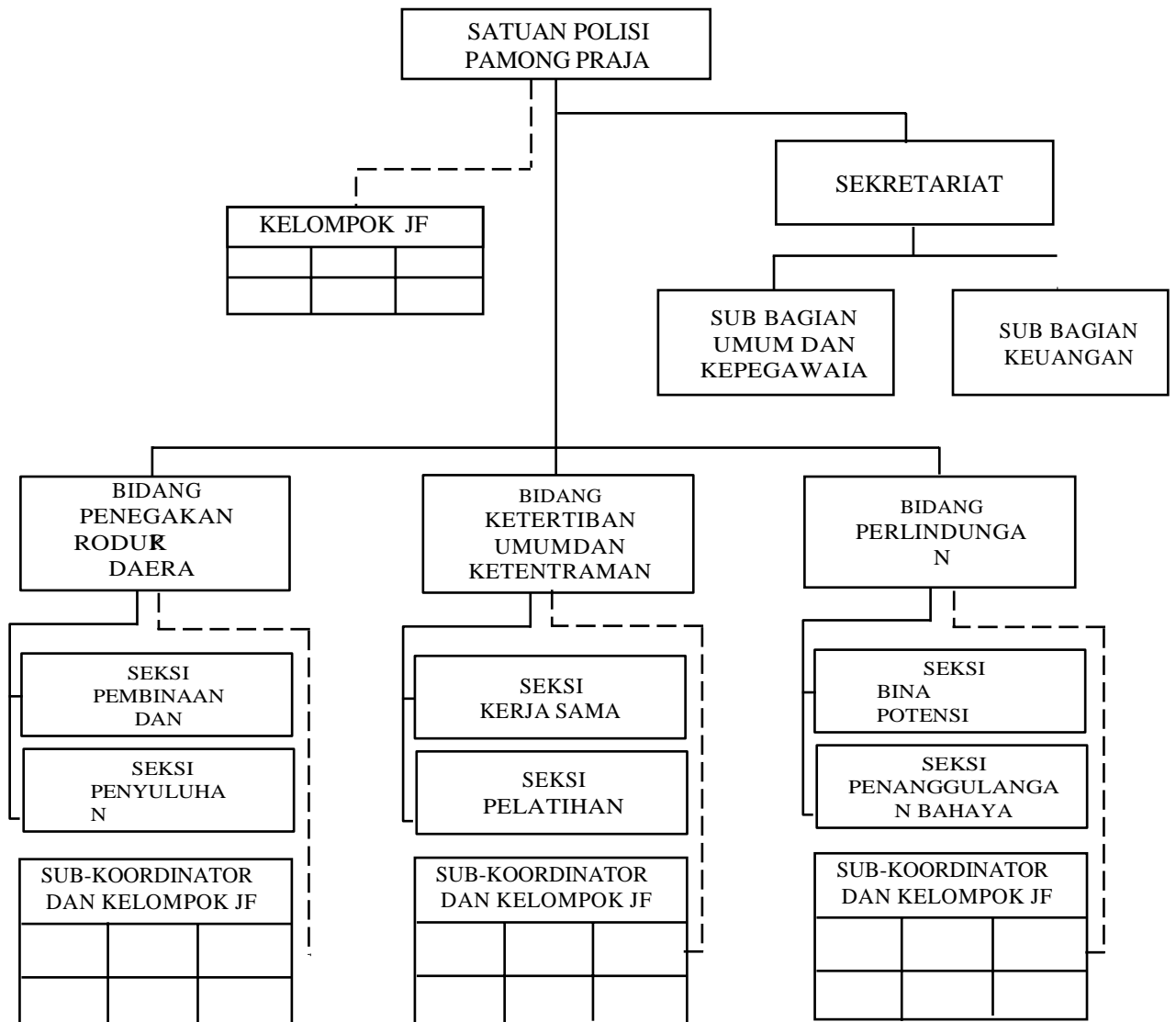
- Perumusan kebijakan dibidang penegakan perundang-undangan daerah, ketertiban umum dan ketertiban masyarakat, sumber daya aparatur, dan perlindungan masyarakat ;
- Pelaksanaan kebijakan dibidang penegakan perundang-undangan daerah, ketertiban umum dan ketertiban masyarakat, sumber daya aparatur, dan perlindungan masyarakat ;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang penegakan perundang-undangan daerah, ketertiban umum dan ketertiban masyarakat, sumber daya aparatur, dan perlindungan masyarakat;
- Penegakan perundang-undangan daerah, ketertiban umum dan ketertiban masyarakat, sumber daya aparatur, dan perlindungan masyarakat ;
- Pelaksanaan administrasi Satuan Polisi Pamong Praja dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

## **c. Struktuir Satuan Polisi Pamong Praja**

Adapun struktur perangkat daerah berdasar Peraturan Bupati No. 93 Tahun 2021

**Gambar 2.1 Bagan Srtuktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang Sumber Daya OPD**

Lampiran Peraturan Bupati Lumajang Nomor 93 Tahun 2021  
Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,  
Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja  
Satuan Polisi Pamong Praja



## 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Kondisi saat ini Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang berjumlah 184 orang personil, yang terdiri atas unsur PNS sebanyak 34 orang dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian



Kerja (tenaga kontrak) sebanyak 180 orang. Untuk unsur PNS dirinci sebagai berikut:

1. Berdasarkan status kepegawaian dan penempatan personil adalah:

- Kepala Satuan 1 Orang
- Sekertariat 20 orang
- Bidang Produk Hukum dan perundang-Undangan 13 orang
- Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat 135 Orang
- Bidang Satuan Perlindungan Masyarakat terdiei dari Satuan Perlindungan Masyarakat 20 Orang dan Pemadam Kebakaran 21 Orang

2. Pendidikan, Kepangkatan/Golongan dan Penjenjangan

**Tabel 2.1**  
**Data Keadaan Pegawai Menurut Golongan Ruang Gaji dan Tingkat Pendidikan**

No	Golongan	Jumlah								Pendidikan Penjenjangan				
		Laki-Laki	Perempuan	SD	SMP	SMA	D3	S1	S2	Struktural			Fungsioanl	
										PIM II	PIM III	PIM IV	Satpol PP	PPNS
1	IV/a	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
2	IV/b	2	-	-	-	-	-	1	-	1	4	11	-	-
3	IV/c		-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
4	IV/d		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	III-a	6	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
6	III-b	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
7	III-c	1	3	-	-	-	-	6	1	-	-	-	-	1
8	III-d	3	2	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-
9	II-d	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	II-c	1	-	-	-	22	-	-	-	-	-	-	-	-
11	II-b	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	II-a	1	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	I-d	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	I-c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	I-b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	I-a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah		37	5	1	4	22	-	12	3	1	4	11	-	-
PNS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PTT		160	20	-	-	188	-	-	-	-	-	-	-	-

No	Golongan	Jumlah								Pendidikan Penjenjangan				
		Laki-Laki	Perempuan	SD	SMP	SMA	D3	S1	S2	Struktural			Fungsioanl	
										PIM II	PIM III	PIM IV	Satpol PP	PPNS
Jumlah Total		217	25	1	4	210		12	3	1	4	11		-

### 3. Sarana dan Prasarana

Dalam menunjang kelancaran efektifitas dan efisiensi kerja, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang terdiri atas:

**Tabel 2.2**  
**Data Sarana dan Prasarana Milik**  
**Berdasarkan Jenis, Jumlah dan Kondisi**

No	Nama Barang	Jumlah	Kondisi		
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	Bangunan (ruang sekretariat)	1	1	-	-
2	Kamar Mandi Utara	1	1	-	-
3	Bangunan (parkir selatan)	1	1	-	-
4	Kamar Mandi ( Selatan )	1	1	-	-
5	Bangunan (gudang)	1	1	-	-
7	Bangunan (parkir utara)	1	1	-	-
8	Bangunan (pos jaga)	1	1	-	-
9	Musholla	1	1	-	-
10	Gedung Pos Jaga Permanen	1	1	-	-
11	Parkir Sepeda Motor ( Utara )	1	1	-	-
12	Portable Generating Set	2	-	2	-
13	Pompa Air	1	1	-	-
14	Station Wagon	3	1	-	2
16	Truck + Attachment	1	-	-	1
17	Pick Up	3	1	-	2
18	Sepeda Motor	21	3	-	18
19	Lemari Besi/Metal	12	-	8	4
20	Band Kas	1	-	-	1
21	Compac Rolling (Lemari Besi Dorong)	1	1	-	-
22	Papan Visuil	4	-	-	4
23	Overhead Projector	3	1	-	2
24	Papan Nama Instansi ( Neon Box )	2	-	-	2

No	Nama Barang	Jumlah	Kondisi		
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
25	Papan Nama Instansi	2	2	-	-
26	Papan Pengumuman	1	1	-	-
27	Tempat Cuci Tangan	6	6	-	-
28	Meja Staf	3	-	-	3
29	Meja Tulis	3	-	-	3
30	Meja rapat panjang	2	2	-	-
31	Meja Panjang	1	-	-	1
32	Meja staf	2	2	-	-
33	Kasur	33	-	-	33
34	Kursi Rapat	50	50	-	-
35	Sofa	1	1	-	-
36	Meja kursi tamu	1	1	-	-
37	Almari Arsip	1	1	-	-
38	Kursi Tunggu	6	6	-	-
39	Lemari Es	1	1	-	-
40	AC Split	7	7	-	-
41	Kipas Angin	6	4	-	2
42	Kompas Gas	1	1	-	-
43	Sound System	2	2	-	-
44	Megaphone	2	2	-	-
45	Lampu Rotari Mobil Patroli	3	3	-	-
46	Alat Pemadam/Portable	25	25	-	-
47	Pompa Kebakaran/Portable	2	2	-	-
48	Generator Busa	3	3	-	-
49	Detektor Kebakaran	3	3	-	-
50	Pipa Pemancar	4	4	-	-
51	Alat Pembantu Pemadam Kebakaran	53	36	-	17
52	Meja Kerja Pejabat Eselon III	15	14	-	1
53	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	2	2	-	-
54	Meja Kerja Pejabat Eselon III	1	1	-	-
55	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	15	15	-	-
56	Handy Talkie (HT)	100	77	-	23
57	Facsimile	2	1	-	1
58	Unit Transceiver UHF Transportable	1	-	-	1
59	Antena VHF/FM Stationary	1	1	-	-
60	Alat Khusus Kepolisian	30	25	-	5
61	Alat Khusus Keamanan	9	3	-	6

No	Nama Barang	Jumlah	Kondisi		
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
	Lainnya				
62	Baju Tahan Panas	5	5	-	-
63	Sepatu Boot Damkar	10	10	-	-
64	P.C Unit	12	7	-	5
65	Lap Top	19	15	-	4

### **2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang berdasarkan sasaran/target Renstra sebelumnya bisa kita lihat pada table berikut ini :

**T-C. 23**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan**  
**Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang**

No	Indikator Kinerja	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Tahun				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Penurunan Pelanggaran Masyarakat atas Perda dan/atau Perkada			√	117,60%	87,88%	61,43%			17,27%	24,57%	37,63%			14,69%	27,96%	61,26%		
2	Presentase Pelanggaran Masyarakat yang di Tindaklanjuti oleh Linmas			√	60%	68,75%	73%			100%	100%	100%			166,67%	145,45%	136,99%		
4	Persentase Penegakan Perda/Perkada			√				85%	85%				83%	20%				98%	24%
3	Presentase Penanganan Kebakaran sesuai Tingkat waktu tanggap (Response time rate) Daerah Wilayah Menegemen Kebakaran (WMK) dalam kota 15 menit	√	√	√	25%	30%	35%	100%	75%	94,59%	100%	100%	70%	18%	378,36%	333,33%	285,71%	70%	24%
6	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan		√		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

No	Indikator Kinerja	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Tahun				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
7	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan		√		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	18%	100%	100%	100%	100%	18%
8	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran		√		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	99%	100%	100%	100%	100%	99%	100%

**T-C. 24**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan.**  
**Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang**

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	821.946.500	973.862.250	N/A	N/A	N/A	757.594.816	939.998.922	N/A	N/A	N/A	92%	97%	N/A	N/A	N/A	18%	24%
Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	2.379.180.000	290.958.000	N/A	N/A	N/A	2.337.243.295	285.668.711	N/A	N/A	N/A	98%	98%	N/A	N/A	N/A	-88%	-88%
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	23.384.000	5.783.000	N/A	N/A	N/A	23.214.000	5.783.000	N/A	N/A	N/A	99%	100%	N/A	N/A	N/A	-75%	-75%
Program Peningkatan Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Umum	7.688.305.000	5.974.630.000	N/A	N/A	N/A	7.645.370.000	5.851.927.800	N/A	N/A	N/A	99%	98%	N/A	N/A	N/A	-22%	-23%
Program penegakan produk hukum daerah	292.074.000	238.235.000	N/A	N/A	N/A	270.298.500	235.489.000	N/A	N/A	N/A	93%	99%	N/A	N/A	N/A	-18%	-13%
Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Illegal	N/A	200.000.000	N/A	N/A	N/A	N/A	167.950.610	N/A	N/A	N/A	N/A	84%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	844.405.000	400.685.000	N/A	N/A	N/A	839.132.500	400.240.343	N/A	N/A	N/A	99%	100%	N/A	N/A	N/A	-53%	-52%
Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	420.105.500	771.400.500	N/A	N/A	N/A	420.014.500	770.783.875	N/A	N/A	N/A	100%	100%	N/A	N/A	N/A	84%	84%

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>	<i>14</i>	<i>15</i>	<i>16</i>	<i>17</i>	<i>18</i>
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota DAU	N/A	N/A	6.001.101.418	5.255.247.102	5.545.947.133	N/A	N/A	5.871.515.461	5.094.487.810	1.126.515.823	N/A	N/A	98%	97%	20%	-8%	-81%
Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	N/A	N/A	5.861.594.000	6.907.199.574	10.657.462.963	N/A	N/A	5.828.379.350	6.604.055.062	976.342.000	N/A	N/A	99%	96%	9%	82%	-83%
<i>Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran</i>	N/A	N/A	605.946.860	540.831.530	750.404.352	N/A	N/A	605.116.500	539.723.888	189.932.000	N/A	N/A	100%	100%	25%	24%	-69%



## **2.4 Kelompok Sasaran Pelayanan**

Pada dasarnya tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja adalah dibidang ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat, dimana pelayanannya berupa penertiban atas pelanggaran perda/perkada, penanganan kejadian kebakaran dan kejadian yang membahayakan manusia dan penanganan pengaduan masyarakat.

Adapun kelompok sasaran pelayanan adalah masyarakat umum adalah :

### **1. Masyarakat umum dan kalangan pengusaha**

Yang dimaksud masyarakat umum disini adalah pedagang kaki lima (PKL), pengusaha, penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) seperti gelandangan dan pengemis dan masyarakat yang melakukan pengaduan yerkait gangguan ketenteraman dan ketertiban umum

### **2. Instansi pemerintah kabupaten Lumajang**

Pemberian pelayanan disini adalah berupa :

- pengamanan pejabat ketika kunjungan dinas ke kota Lumajang
- pengamanan wilayah ketika ada acara penting di semua instansi pemerintah yang membutuhkan
- pemberian latihan terkait pelaksanaan upacara hari senin dan hari besar nasional kepada petugas upacara di lingkungan pemerintah kabupaten Lumajang

### **3. Intansi swasta**

- Pengamanan tamu penting dari pihak swasta ketika kunjungan kerja ke kota Lumajang pengamanan wilayah ketika ada acara penting di semua instansi pemerintah
- pengamanan wilayah ketika ada acara penting di semua instansi swasta yang membutuhkan

## **2.5 Mitra Perangkat Daerah Dalam Pemberian Pelayanan**

Dalam menjalankan tugas terdapat mitra dalam pelayanan antara lain berupa kerjasama dan koordinasi sehingga ketenteran dan ketertiban umum dapat terwujud. Kerjasama didasarkan atas hubungan fungsional, saling membantu, dan saling menghormati dengan mengutamakan kepentingan umum dan memperhatikan herarki dan kode etik birokrasi.

Adapun beberapa mitra kerja Satuan Polisi Pamong Praja antar lain :

1. Satpol PP dalam melaksanakan tugasnya dapat meminta bantuan dan/atau bekerjasama dengan Kepolisian dan/atau instansi vertikal lainnya.
2. Satpol PP dalam hal meminta bantuan kepada Kepolisian dan/atau instansi vertical lainnya bertindak selaku koordinator operasi lapangan.
3. Kerjasama dengan dinas lain seperti Dinsos, Kesbangpol, BPRD, DPMPTSP, DISPENDUKAPIL, DINKES, Bea Cukai Probolinggo dimana kerjasama tersebut berupa koorinasi yang bertujuan untuk menciptakan ketenteraman dan ketertiban umum di masyarakat.
4. Bermitra dengan Satlinmas dan Babinsa Desa/Kecamatan

Dalam menjaga lingkungan di masyarakat dilaksanakan kerjasama antara Satlinmas dan Babinsa yang berada di Desa/Kelurahan yang bertujuan untuk menjaga ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat

5. Bermitra dengan Badan Narkotika Nasional (BNN)

Dalam patrol wilayah terdapat hasil dari kenakalan remaja ataupun masyarakat umum dimana dari hasil tersebut didapat bahwa anak masyarakat tersebut dalam keadaan penggunaan

zat adiptif, adapun tindak selanjutnya adalah berkoordinasi dengan pihak Badan Narkotika Nasional (BNN), sehingga yang bersangkutan mendapat penanganan selanjutnya.

#### 6. Bermitra dengan Dinas perhubungan dan Kesbangpol

Dalam penanganan ketenteraman dan ketertiban umum di butuhkan kerjasama dengan dinas perhubungan, yang bertujuan untuk pengamanan terkait lalu lintas dalam kegiatan pengamanan pasca erupsi gunung Semeru, Pengamanan dan Pengawalan tamu pejabat, pengamanan Pilkada dan acara-acara besar yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Lumajang dan kerjasama dengan kesbangpol yang bertujuan untuk pemantau terhadap isu-isu yang berkembang di masyarakat yang membahayakan negara.

#### 7. Bermitra dengan Dinas Sosial

Dalam kegiatan SATPOL PP terdapat patrol wilayah dan terdapat hasil patrol yaitu berupa penertiban Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) seperti gelandangan, pengemis, anak jalanan, badut di pinggir jalan raya. Adapun tindak lanjut dari hasil penertiban tersebut yaitu koordinasi dengan Dinas Sosial.

#### 8. Bermitra dengan Badan Narkotika Nasional (BNN)

Dalam patrol wilayah terdapat hasil dari kenakalan remaja dimana dari hasil tersebut didapat bahwa anak tersebut dalam keadaan penggunaan zat adiptif, adapun tindak selanjutnya adalah berkoordinasi dengan pihak Badan Narkotika Nasional (BNN), sehingga anak tersebut mendapat penanganan selanjutnya.

## 9. Bermitradengan Anggota Satlinmas dan Babinsa Desa/Kecamatan

Dalam menjaga lingkungan di masyarakat dilaksanakan kerjasama antara Satlinmas dan Babinsa yang berada di Desa/Kelurahan. Adapaun tujuannya adalah menjaga stabilnya ketententeraman dan ketertiban umum masyarakat.

### **2.6 Dukungan BUMD Dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah**

Terdapat dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja antara lain :

- a. PDAM dalam pengisian hydrant untuk penanganan kebakaran
- b. Pengamanan Perusahaan Daerah semeru, adapun kegiatannya adalah pengamanan stokphile dan tambang semeru, yaitu berupa sarana dan prasarana dan makan minum.
- c. Bank Jatim dan Bank Pasar berupa penyediaan sarana dan prasaran untuk penataan bagi Pedagang Kaki Lima

### **2.7 Kerjasama Perangkat Daerah**

Dalam melaksanakan tugas menciptakan ketententeraman dan ketertiban umum Satuan Polisi Pamong Praja melakukan kerjasama, dimana kerjasama tersebut terdiri dari kerjasama intern dan extern. Adapun bentuk kerjasama tersebut adalah :

- a. Kerjasama intern

Yaitu kerjasama yang dilakukan antar bidang di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja, misalnya kerjasama antar bidang ketententeraman dan ketertiban umum dengan bidang perlindungan masyarakat dan bidang penegakan produk

hukum daerah dan tidak menutup kemungkinan bidang sekretariat masuk di dalamnya karena keadaan tidak dapat di prediksi dan dapat terjadi dengan tiba-tiba, misalnya bencana alam erupsi gunung semeru, kerusuhan massa, sehingga dengan keadaan tersebut semua bidang harus kerjasama dalam penagannya mengingat bahwa tugas tersebut adalah dibidang ketenteraman dan ketertiban umum. Adapun waktu kerjasama adalah setiap saat menyesuaikan dengan kondisi

b. Kerjasama extern

Yang dimaksud disini adalah kerjasama yang dilakukan dengan instansi lain dan jajaran samping yang bertujuan untuk mewujudkan ketenterman dan ketertiban umum, adapun bentuk kerjasama tersebut adalah :

- kerjasama “Tiga Pilar”

Kerjasama ini yang terdiri dari Satpol PP, TNI dan POLRI.

Tujuan dari Tiga Pilar ini adalah untuk peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum di masyarakat.

Kegiatan tiga pilar ini adalah patroli wilyaah dengan sasaran tempat rawan begal dan tempat yang diduga terjadinya kegiatan prostitusi. Selain kegiatan tersebut adalah pengamanan terjadinya bencana alam seperti pengamanan daerah pasca erupsi gunung Semeru, operasi masker dalam pencegahan virus covid-19. Kerjasama tiga pilar ini masuk dalam kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan Kerjasama Antar Lembaga dan Kementrian Dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang di ampuh oleh seksi Kerjasama. Adapun kerjasa ini dilakukan setiap tahun.

- kerjasama “gempur rokok ilegal”

bentuk kerjasama ini adalah dilakukan dengan kantor bea cukai cabang kota Probolinggo yang bertujuan menekan peredaran rokok ilegal, adapaun instansi didalamnya antara lain Satuan Polisi Pamong Praja, TNI/POLRI, bagian Ekonomi dan bagian cukai kota probolinggo, kegiatan ini diampuh oleh bidang penegakan produk hukum daerah dinas perdagangan. Adapun waktu kerjasama ini dilakukan setiap tahun. Kegiatan tersebut adalah :

- Operasi rokok ilegal. Kegiatan tersebut berupa kegiatan operasi rokok yang ilegal/yang tidak berlabel dari cukai yang dilakukan di Kabupaten Lumajang. Dengan diadakannya operasi tersebut dengan harapan mengurangi penjual rokok ilegal sehingga menambah pendapatan negara. Kegiatan ini masuk dalam kegiatan Penegakan Perda Kabupaten /Kota dan Peraturan Bupati/Walikota di sub.kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati /Walikota dan sub.kegiatan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Bupati/Walikota
- Pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi petani tembakau, pembagian BLT tersebut dibagikan kepada para petani tembakau
- Sosialisasi perundang undangan barang kenai cukai, dimana peserta sosialisasi tersebut adalah para pedagang

4. Kerjasama Tim “Wasdal Menara Telekomunikasi”

Di dalamnya terdiri dari DPMPTSP, DPKP, PU dan SATPOL PP, kegiatan didalamnya adalah monitoring dan evaluasi terkait redistribusi, kepemilikan ijin kelayakan bangunan Menara. Adapun waktu kerjasama ini adalah setiap tahun

5. Tim verifikasi lapangan ijin penyelenggaraan reklame (IPR)

Kerjasama tim bertujuan terkait penertiban pemasangan reklame, dimana kegiatannya fokus pada titik-titik pemasangan reklame sesuai aturan yang berlaku. Lading sector tim adalah DPMPTSP dan anggota tim terdiri dari Satpol PP, DISHUB, DPU dan Tata Ruang, BPRD, DPKP. Adapun waktu kerjasama ini adalah setiap tahun

6. Kerjasama tim sitplan / ijin bangunan gedung

Kerjasama tim ini bertujuan untuk persetujuan bangunan gedung, lading sektornya adalah DPKP didalamnya terdiri dari Dinas DPKP, SATPOL PP, DISHUB, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang. Maksud kegiatan ini adalah terkait Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), dimana didalamnya mengatur struktural layak fungsi bangunan, Adapun waktu kerjasama ini adalah setiap tahun

7. Kerjasama Tim Wasdal berbasis resiko

Kerjasama tim ini bertujuan untuk pengawasan perijinan dan dampak lingkungan terkait limbah di perusahaan dan dampak gangguan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat. Lading sector tim adalah DPMPTSP anggotanya adalah Satpol PP, Dinas Pariwisata, DLH, DINKES, DISPERINDAG, PUTR, dan DISHUB. Adapun waktu kerjasama ini adalah setiap tahun

**BAB III**  
**PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

**3.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah**

Di depan telah dikemukakan bahwa beban yang harus dipikul oleh Satpol PP Kabupaten Lumajang demikian besar, hal itu masih akan bertambah dengan ketidak maksimalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut kelemahan internal antara lain pada tabel Tb.35 di bawah ini :

Tabel Tb.35  
Pemetaan Masalah

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3
Belum terciptanya ruang wilayah yang nyaman	Tingginya risiko bencana	Belum adanya relawan petugas penanganan kebakaran
		Minimnya Sarana dan prasarana terkait penanganan kebakaran dan non kebakaran
		belum terbentuknya Wilayah Manajemen Kebakaran
	Potensi kerawanan wilayah	Terbatasnya sumber daya manusia dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
		Belum optimalnya penerapan sanksi terhadap pelanggaran Perda/Perkada
		Belum adanya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)



### **3.2 Isu-isu Strategis**

Bertolak dari telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis tersebut, dapat digambarkan bahwa isu-isu strategis yang akan berpengaruh terhadap kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang antara lain :

- a. Minimnya Sarana dan prasarana
- b. Masih banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat terutama penggararan Pedagang Kaki Lima (PKL) dan Reklame.
- c. Masih terjadinya gangguan ketenterman dan ketertiban umum masyarakat
- d. Minimnya pemahaman terkait perda Pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL), dan perda pemasangan benner sehingga banyaknya pelanggaran yang dilkaukan oleh Pedagang Kaki Lima (PKL) dan pelaku usaha terkait pemasangan aturan benner
- e. Kurang profesionalisme pelayanan terhadap masyarakat, terutama pada etika kerja, perlakuan arogan yang dirasa oleh masyarakat
- f. Pelaksanaan pengamanan Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2024
- g. Besar anggaran belum sepenuhnya mendukung dalam mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum, mengingat bahwa urusan ketenteraman dan ketertiban umum adalah urusan /wajib

**BAB IV**  
**TUJUAN DAN SASARAN**

4.1 Tujuan dan Sasaran

Tujuan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang tahun 2024-2026 antara lain Terciptanya kelestarian lingkungan hidup dan kesiapsiagaan bencana dan rasa aman

Adapun tujuan tersebut terdapat pada tc 25 di bawah ini

Tabel TC.25  
Tujuan dan Sasaran

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan	Target		
					2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Terciptanya kelestarian lingkungan hidup dan kesiapsiagaan bencana dan rasa aman		Indeks resiko bencana	Angka	Ancaman x kerentanan di bagi kapasitas	110,73	109,28	107,86
		Indeks rasa aman	Predikat	Hasil Kajian Indeks Rasa Aman	Aman	Aman	Aman
	Meningkatnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Persentase penurunan pelanggaran perda/perkada dan gangguan trantibum	%	Jumlah kasus tahun sebelumnya dikurangi jumlah kasus tahun berjalan dibagi jumlah kasus tahun sebelumnya kali 100%	1,89	2	2,15

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan	Target		
					2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
		Persentase penurunan bencana kebakaran dan non kebakaran serta kondisi yang membahayakan manusia	%	Jumlah kasus bencana kebakaran dan non kebakaran serta kondisi yang membahayakan manusia tahun sebelumnya dikurangi Jumlah kasus bencana kebakaran dan non kebakaran serta kondisi yang membahayakan manusia tahun berjalan dibagi Jumlah kasus bencana kebakaran dan non kebakaran	1,86	1,9	1,94

#### 4.2 Cascading Kinerja Perangkat Daerah

Tabel cascading kinerja

Tujuan/Sasaran Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub kegiatan	Indikator
1	2	3	4	5	6
Terciptanya kelestarian lingkungan hidup dan kesipsiagaan bencana dan rasa aman					indeks resiko bencana

Tujuan/Sasaran Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub kegiatan	Indikator
					indeks rasa aman
	Meningkatnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat				Persentase penurunan pelanggaran perda/perkada dan gangguan trantibum
					persentase penurunan bencana kebakaran dan non kebakaran serta kondisi yang membahayakan manusia
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase fasilitasi penyusunan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi

Tujuan/Sasaran Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub kegiatan	Indikator
					Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

Tujuan/Sasaran Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub kegiatan	Indikator
			Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase fasilitasi Administrasi Umum PD
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase fasilitasi jasa penunjang urusan pemerintah daerah
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Tujuan/Sasaran Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub kegiatan	Indikator
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
				Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemeliharaan BMD
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			Persentase penurunan pelanggaran perda/perkada

Tujuan/Sasaran Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub kegiatan	Indikator
					Persentase penurunan pelanggaran gangguan trantibum
			Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah penanganan pelanggaran gangguan trantibum
				Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan
				Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan



Tujuan/Sasaran Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub kegiatan	Indikator
				Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat Dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum
				Peningkatan Kapasitas SDM Satpol Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk Dalam Pelaksanaan Tugas Yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya
				Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani
			Penegakan Perda Kabupaten /Kota dan Peraturan Bupati/Walikota		Jumlah penanagnan pelanggran perda/perkada sesuai SOP
				Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati /Walikota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha

Tujuan/Sasaran Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub kegiatan	Indikator
				Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
			Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota		persentase Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang terbina
				Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada
		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN			Persentase Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)

Tujuan/Sasaran Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub kegiatan	Indikator
					cakupan pelayanan penanggulangan non kebakaran dan kondisi yang membahayakan manusia
			Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota		persentase penanganan kejadian kebakaran dan penanganan B3
				Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penganggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya
				Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
				Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan

Tujuan/Sasaran Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub kegiatan	Indikator
					Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran
				Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya
				Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran
				Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga

Tujuan/Sasaran Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub kegiatan	Indikator
			Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran		persentase ketersediaan Peralatan Proteksi Kebakaran sesuai standart
				Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Diperkirakan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran
			Investigasi Kejadian Kebakaran		persentase Investigasi Kejadian Kebakaran
				Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian dan Penelitian
			Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran		Prosentse Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran
				Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya

Tujuan/Sasaran Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub kegiatan	Indikator
				Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya
				Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana	Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Saprass Damkar
			Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia		Persentase penanganan kasus kondisi membahayakan manusia
				Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia

## BAB V

### STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

#### 5.1 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi penyelenggaraan pemerintahan di bidang Ketentraman masyarakat dan ketertiban umum serta Penegakan Peraturan Daerah dihasilkan dari identifikasi faktor internal dan eksternal Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang.

Strategi untuk pencapaian tujuan dan sasaran adalah dengan menetapkan kebijakan strategis yaitu kebijakan teknis yang akan dilaksanakan secara efektif dan efisien dengan menggunakan prinsip akuntabilitas, mencakup :

#### T-C 26

#### Tujuan, Sasaran, strategi dan Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4
Terciptanya kelestarian lingkungan hidup dan kesiapsiagaan bencana dan rasa aman			
	Meningkatnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Penurunan pelanggaran perda/perkada	Peningkatan penurunan pelanggaran perda/perkada
		Penurunan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat	Peningkatan penurunan gangguan ketenterman dan ketertiban umum masyarakat
		Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Polisi Pamong Praja dalam Penegakkan Peraturan Daerah	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Polisi Pamong Praja dalam Penegakkan Peraturan Daerah

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4
		Meningkatkan capaian respon time penanganan kejadian kebakaran	Pembentukan wilayah manajemen kebaaran (WMK) dan relawan pemadam kebakaran
		Meningkatkan Tata Kelola Pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Peningkatan Tata Kelola Pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
		Meningkatkan pemahaman masyarakat atas perda/perkada	Peningkatan pemahaman masyarakat atas perda/perkada
		Meningkatkan Peran Anggota Linmas	Peningkatan Peran Anggota Linmas.



## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan dalam program dan kegiatan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan organisasi, sedangkan program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan baik kualitatif maupun kuantitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi baik kinerja input, output, outcome maupun impact yang sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan.

Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang tahun 2024 – 2026 dapat dilihat pada tabel tc 27 dibawah ini.

**TC 27**  
**Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan**  
**Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang**

T-C.27																
	Sasaran Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan	Capaian awal tahun perencanaan (Tahun 2022)	2024		2025		2026		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
01:05	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>							<b>22.599.431.287</b>		<b>20.044.338.266</b>		<b>17.892.904.292</b>		<b>60.536.673.845</b>	<b>Satuan Polisi Pamong Praja</b>	<b>Kabupaten Lumajang</b>
1.05.001	Terselenggaranya fasilitasi kebutuhan operasional kantor	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA</b>	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	%	<i>Jumlah fasilitasi kebutuhan operasional kantor yang dipenuhi dibagi Jumlah fasilitasi kebutuhan operasional kantor yang direncanakan dikali 100</i>	100	100	7.049.619.387	100	6.316.320.326	100	6.947.952.358	100	20.313.892.071	<b>Satuan Polisi Pamong Praja</b>	<b>Kabupaten Lumajang</b>

## T-C.27

1	2	3	4	5	6	7	2024		2025		2026		Akhir Periode		16	17
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
							8	9	10	11	12	13	14	15		
1.05.001.2.01	Terfasilitasinya penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi penyusunan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	%	Jumlah fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang dipenuhi dibagi jumlah fasilitasi dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang direncanakan dikali 100	100	100	11.886.000	100	13.290.000	100	14.619.000	100	39.795.000	Satuan Polisi Pamong Praja	Kabupaten Lumajang
1.05.001.2.01.01	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	2	10.290.000	3	10.290.000	2	11.319.000	7	31.899.000	Satuan Polisi Pamong Praja	Kabupaten Lumajang

## T-C.27

1	2	3	4	5	6	7	2024		2025		2026		Akhir Periode		16	17
							8	9	10	11	12	13	14	15		
1.05.01.2.01.02	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	<i>Dokumen</i>	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	1	0	1	750.000	1	825.000	3	<b>1.575.000</b>	Satuan Polisi Pamong Praja	Kabupaten Lumajang
1.05.01.2.01.03	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	<i>Dokumen</i>	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	1	0	2	750.000	2	825.000	5	<b>1.575.000</b>	Satuan Polisi Pamong Praja	Kabupaten Lumajang
1.05.01.2.01.06	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	<i>Laporan</i>	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	5	5	1.596.000	5	750.000	5	825.000	15	<b>3.171.000</b>	Satuan Polisi Pamong Praja	Kabupaten Lumajang

## T-C.27

1	Sasaran Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan	Capaian awal tahun perencanaan (Tahun 2022)	2024		2025		2026		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
							8	9	10	11	12	13	14	15		
	Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD											
1.05.01.2.01.07	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17	17	0	17	750.000	17	825.000	51	1.575.000	Satuan Polisi Pamong Praja	Kabupaten Lumajang
1.05.001.2.02	terpenuhinya fasilitasi administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	Jumlah fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang dipenuhi dibagi jumlah fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang direncanakan dikali 100	100	100	4.147.106.008	100	4.564.066.609	100	5.020.473.270	100	13.731.645.886	Satuan Polisi Pamong Praja	Kabupaten Lumajang

## T-C.27

1	2	3	4	5	6	7	2024		2025		2026		Akhir Periode		16	17
							8	9	10	11	12	13	14	15		
1.05.0 01.2.0 2.01	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang /Bulan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	38/12	38/12	4.081.650.008	38/12	4.489.815.009	38/12	4.938.796.510	38/12	<b>13.510.261.526</b>	Satuan Polisi Pamong Praja	Kabupaten Lumajang
1.05.0 01.2.0 2.02	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	12	61.072.000	12	67.179.200	12	73.897.120	36	<b>202.148.320</b>	Satuan Polisi Pamong Praja	Kabupaten Lumajang
1.05.0 01.2.0 2.03	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	0	0	12	750.000	12	825.000	24	<b>1.575.000</b>	Satuan Polisi Pamong Praja	Kabupaten Lumajang
1.05.0 01.2.0 2.04	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12	0	0	12	750.000	12	825.000	24	<b>1.575.000</b>	Satuan Polisi Pamong Praja	Kabupaten Lumajang

## T-C.27

1	2	3	4	5	6	7	2024		2025		2026		Akhir Periode		16	17
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1.05.01.2.02.05	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	5	2.600.000	5	2.860.000	5	3.146.000	15	<b>8.606.000</b>	Satuan Polisi Pamong Praja	Kabupaten Lumajang
1.05.01.2.02.06	Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2	0	0	2	750.000	2	825.000	4	<b>1.575.000</b>	Satuan Polisi Pamong Praja	Kabupaten Lumajang
1.05.01.2.02.07	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan	Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan	12	12	1.784.000	12	1.962.400	12	2.158.640	36	<b>5.905.040</b>	Satuan Polisi Pamong Praja	Kabupaten Lumajang

## T-C.27

1	2	3	4	5	6	7	2024		2025		2026		Akhir Periode		16	17
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
							8	9	10	11	12	13	14	15		
	Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD											
<b>1.05.001.2.03</b>	<b>Terpenuhnya fasilitas administrasi Barang Milik Daerah</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase fasilitas Administrasi BMD Perangkat Daerah</b>	%	<b>Jumlah fasilitas Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah yang dipenuhi dibagi Jumlah fasilitas Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah yang direncanakan dikali 100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>1.500.000</b>	<b>100</b>	<b>1.650.000</b>	<b>100</b>	<b>3.150.000</b>	<b>Satuan Polisi Pamong Praja</b>	<b>Kabupaten Lumajang</b>
1.05.01.2.03.01	Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2	0	0	2	750.000	2	825.000	4	<b>1.575.000</b>	Satuan Polisi Pamong Praja	Kabupaten Lumajang



## T-C.27

1	2	3	4	5	6	7	2024		2025		2026		Akhir Periode		16	17
							8	9	10	11	12	13	14	15		
1.05.001.2.03.05	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2	0	0	2	750.000	2	825.000	4	1.575.000	Satuan Polisi Pamong Praja	Kabupaten Lumajang
1.05.001.2.05	terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase fasilitas Administrasi Kepegawaian PD	%	Jumlah fasilitas administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang dipenuhi dibagi Jumlah fasilitas administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang direncanakan dikali 100	100	0	0	100	1.500.000	100	1.650.000	100	3.150.000	Satuan Polisi Pamong Praja	Kabupaten Lumajang
1.05.001.2.05.02	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	NA	0	0	1	750.000	1	825.000	2	1.575.000	Satuan Polisi Pamong Praja	Kabupaten Lumajang

## T-C.27

1	2	3	4	5	6	7	2024		2025		2026		Akhir Periode		16	17
							8	9	10	11	12	13	14	15		
1.05.001.205.05	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	NA	0	0	3	750.000	3	825.000	6	<b>1.575.000</b>	Satuan Polisi Pamong Praja	Kabupaten Lumajang
<b>1.05.001.206</b>	<b>Terpenuhnya Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase fasilitas Administrasi Umum PD</b>	<b>%</b>	<b>Jumlah fasilitas administrasi umum Perangkat Daerah yang dipenuhi dibagi Jumlah fasilitas administrasi umum Perangkat Daerah yang dipenuhi dikali 100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>187.734.973</b>	<b>100</b>	<b>207.258.470</b>	<b>100</b>	<b>227.984.317</b>	<b>100</b>	<b>622.977.761</b>	<b>Satuan Polisi Pamong Praja</b>	<b>Kabupaten Lumajang</b>
1.05.001.206.01	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2	2	10.520.469	2	11.572.516	2	12.729.767	6	<b>34.822.752</b>	Satuan Polisi Pamong Praja	Kabupaten Lumajang

## T-C.27

1	2	3	4	5	6	7	2024		2025		2026		Akhir Periode		16	17
							8	9	10	11	12	13	14	15		
1.05.0 01.2.0 6.04	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4	6	94.684.044	6	104.152.448	6	114.567.693	18	<b>313.404.186</b>	Satuan Polisi Pamong Praja	Kabupaten Lumajang
1.05.0 01.2.0 6.05	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2	2	10.364.460	2	11.400.906	2	12.540.997	6	<b>34.306.363</b>	Satuan Polisi Pamong Praja	Kabupaten Lumajang
1.05.0 01.2.0 6.08	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	NA	0	0	12	750.000	12	825.000	24	<b>1.575.000</b>	Satuan Polisi Pamong Praja	Kabupaten Lumajang
1.05.0 01.2.0 6.09	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	45	12	72.166.000	12	79.382.600	12	87.320.860	36	<b>238.869.460</b>	Satuan Polisi Pamong Praja	Kabupaten Lumajang

## T-C.27

1	Sasaran Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan	Capaian awal tahun perencanaan (Tahun 2022)	2024		2025		2026		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
							8	9	10	11	12	13	14	15		
	Konsultasi SKPD		Konsultasi SKPD		Konsultasi SKPD										ng Pr aja	
<b>1.05.002.2.07</b>	<b>Terpenuhiya Barang Milik daerah Perangkat Daerah</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah</b>	<b>%</b>	<b>Jumlah Barang Milik Daerah yang dipenuhi dibagi Jumlah Barang Milik Daerah yang direncanakan dikali 100</b>	<b>NA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>2.250.000</b>	<b>100</b>	<b>2.475.000</b>	<b>100</b>	<b>4.725.000</b>	<b>Satuan Polisi Pamong Praja</b>	<b>Kabupaten Lumajang</b>
1.05.02.2.07.06	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	NA	0	0	12	750.000	12	825.000	24	<b>1.575.000</b>	Satuan Polisi Pamong Praja	Kabupaten Lumajang
1.05.02.2.07.09	Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	NA	0	0	2	750.000	2	825.000	4	<b>1.575.000</b>	Satuan Polisi Pamong Praja	Kabupaten Lumajang

## T-C.27

1	2	3	4	5	6	7	2024		2025		2026		Akhir Periode		16	17
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
							8	9	10	11	12	13	14	15		
1.05.02.2.07.10	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	NA	0	0	1	750.000	1	825.000	2	1.575.000	Satuan Polisi Pamong Praja	Kabupaten Lumajang
1.05.002.2.08	Terpenuhiya fasilitas Jasa Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah	Persentase fasilitas jasa penunjang urusan pemerintah daerah	%	Jumlah fasilitas Jasa Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah yang dipenuhi dibagi Jumlah fasilitas Jasa Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah yang direncanakan dikali 100	100	100	623.910.000	100	686.301.000	100	754.931.100	100	2.065.142.100	Satuan Polisi Pamong Praja	Kabupaten Lumajang

## T-C.27

1	2	3	4	5	6	7	2024		2025		2026		Akhir Periode		16	17
							8	9	10	11	12	13	14	15		
1.05.0 02.2.0 8.01	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	12	240.000	12	264.000	12	290.400	36	<b>794.400</b>	Satuan Polisi Pamong Praja	Kabupaten Luajang
1.05.0 02.2.0 8.02	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	116.850.000	12	128.535.000	12	141.388.500	36	<b>386.773.500</b>	Satuan Polisi Pamong Praja	Kabupaten Luajang
1.05.0 02.2.0 8.04	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	506.820.000	12	557.502.000	12	613.252.200	36	<b>1.677.574.200</b>	Satuan Polisi Pamong Praja	Kabupaten Luajang
<b>1.05.004.2.09</b>	<b>Terpenuhiya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah</b>	<b>Persentase pemeliharaan BMD</b>	<b>%</b>	<b>Jumlah Barang Milik Daerah yang mendapatkan pemeliharaan</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>2.078.982.406</b>	<b>100</b>	<b>840.154.247</b>	<b>100</b>	<b>924.169.671</b>	<b>100</b>	<b>3.843.306.324</b>	<b>Satuan Polisi Pamong Praja</b>	<b>Kabupaten Luajang</b>

## T-C.27

1	Sasaran Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan	Capaian awal tahun perencanaan (Tahun 2022)	2024		2025		2026		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
							8	9	10	11	12	13	14	15		
	<b>Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>an Daerah</b>			<b>n dibagi Jumlah Barang Milik Daerah yang direncanakan pemeliharaan dikali 100</b>									<b>ong Pr aja</b>		
1.05.04.2.09.02	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	35	35	557.858.406	35	613.644.247	35	675.008.671	105	<b>1.846.511.324</b>	Satuan Polisi Pamong Praja	Kabupaten Lumajang
1.05.04.2.09.06	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40	40	24.100.000	40	26.510.000	40	29.161.000	120	<b>79.771.000</b>	Satuan Polisi Pamong Praja	Kabupaten Lumajang

## T-C.27

1	Sasaran Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan	Capaian awal tahun perencanaan (Tahun 2022)	2024		2025		2026		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
							8	9	10	11	12	13	14	15		
1.05.04.2.09.09	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	NA	1	1.497.024.000	1	200.000.000		220.000.000	2	<b>1.917.024.000</b>	Satuan Polisi Pamong Praja	Kabupaten Lumajang
<b>1.05.02</b>	<b>Meningkatnya upaya penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Persentase penurunan pelanggaran perda/perkada</b>	<b>%</b>	<b>Jumlah kasus tahun sebelumnya dikurangi jumlah kasus tahun berjalan dibagi jumlah kasus tahun sebelumnya dikali 100%</b>	<b>NA</b>	<b>0,25</b>	<b>14.171.958.400</b>	<b>0,75</b>	<b>12.170.201.440</b>	<b>1</b>	<b>9.231.353.784</b>	<b>1,99</b>	<b>35.573.513.624</b>	<b>Satuan Polisi Pamong Praja</b>	<b>Kabupaten Lumajang</b>
			<b>Persentase penurunan pelanggaran gangguan trantibum</b>	<b>%</b>	<b>Jumlah kasus tahun sebelumnya dikurangi jumlah kasus tahun berjalan dibagi jumlah kasus tahun sebelumnya dikali 100%</b>	<b>NA</b>	<b>1,64</b>		<b>1,72</b>		<b>1,75</b>	<b>-</b>	<b>1,75</b>			



## T-C.27

1	2	3	4	5	6	7	2024		2025		2026		Akhir Periode		16	17
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
<b>1.05.02.2.01</b>	<b>Meningkatnya Penanganan Gangguan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>Penanganan Gangguan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>Jumlah penanganan pelanggaran gangguan trantibum</b>	<b>kejadian</b>	<b>Jumlah penanganan pelanggaran gangguan trantibum</b>	<b>100</b>	<b>60</b>	<b>10.715.748.000</b>	<b>59</b>	<b>8.356.370.000</b>	<b>58</b>	<b>5.036.139.200</b>	<b>1777</b>	<b>24.108.257.200</b>	<b>Satuan Polisi Pamong Praja</b>	<b>Kabupaten Lumajang</b>
1.05.02.2.01.01	Terlaksananya Pencegahan Gangguan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Pencegahan Gangguan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Kasus Gangguan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Kasus	Jumlah Kasus Gangguan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	346	60	6.872.530.000	59	4.500.000.000	58	1.500.000.000	1777	<b>12.872.530.000</b>	Satuan Polisi Pamong Praja	Kabupaten Lumajang

## T-C.27

1	2	3	4	5	6	7	2024		2025		2026		Akhir Periode		16	17
							8	9	10	11	12	13	14	15		
1.05.0 2.2.01 .02	Terlaksananya Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Kasus	Jumlah Kasus Gangguan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	546	2150	1.145.120.000	2100	1.259.632.000	2050	1.385.595.200	6300	<b>3.790.347.200</b>	Satuan Polisi Pamong Praja	Kabupaten Lumajang
1.05.0 2.2.01 .03	Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	12	8	1.841.698.000	8	1.641.698.000	8	1.100.000.000	24	<b>4.583.396.000</b>	Satuan Polisi Pamong Praja	Kabupaten Lumajang

## T-C.27

1	2	3	4	5	6	7	2024		2025		2026		Akhir Periode		16	17
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
			Kota		Kota											
1.05.02.2.01.04	Tersedianya Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat Dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Dokumen	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12	0	0	5	750.000	5	825.000	10	<b>1.575.000</b>	Satuan Polisi Pamong Praja	Kabupaten Lumajang
1.05.02.2.01.05	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang	Peningkatan Kapasitas SDM Satpol Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas Yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	40	40	20.400.000	42	22.440.000	42	24.684.000	14	<b>67.524.000</b>	Satuan Polisi Pamong Praja	Kabupaten Lumajang

## T-C.27

1	Sasaran Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan	Capaian awal tahun perencanaan (Tahun 2022)	2024		2025		2026		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
							8	9	10	11	12	13	14	15		
	Bernuansa Hak Asasi Manusia															
1.05.02.2.01.06	Terlaksananya Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan Dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	12	125	836.000.000	130	919.600.000	140	1.011.560.000	395	<b>2.767.160.000</b>	Satuan Polisi Pamong Praja	Kabupaten Lumajang
1.05.02.2.01.07	Tersedianya Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketertarikan dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketertarikan dan Ketertiban Umum yang Tersedia	Unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketertarikan dan Ketertiban Umum yang Tersedia	NA	0	0	3	750.000	3	825.000	6	<b>1.575.000</b>	Satuan Polisi Pamong Praja	Kabupaten Lumajang

## T-C.27

	Sasaran Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan	Capaian awal tahun perencanaan (Tahun 2022)	2024		2025		2026		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.05.02.2.01.08	Tersedianya Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	Dokumen	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	NA	0	0	12	1.500.000	12	1.650.000	24	<b>3.150.000</b>	Satuan Polisi Pamong Praja	Kabupaten Lumajang
1.05.02.2.01.09	Tersedianya Laporan Penyediaan Layanan dalam rangka penyelesaian Dampak Penegakan Perda dan Perkada	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	NA	0	0	10	10.000.000	10	11.000.000	20	<b>21.000.000</b>	Satuan Polisi Pamong Praja	Kabupaten Lumajang
<b>1.05.02.2.02</b>	<b>Meningkatnya Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali kota</b>	<b>Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali kota</b>	<b>Jumlah penanagnan pelanggaran perda/perkda sesuai SOP</b>	<b>Kasus</b>	<b>Jumlah penanagnan pelanggaran perda/perkda sesuai SOP</b>	<b>100</b>	<b>2833</b>	<b>3.456.210.400</b>	<b>2830</b>	<b>3.801.831.440</b>	<b>2825</b>	<b>4.182.014.584</b>	<b>8488</b>	<b>11.440.056.424</b>	<b>Satuan Polisi Pamong Praja</b>	<b>Kabupaten Lumajang</b>

## T-C.27

1	2	3	4	5	6	7	2024		2025		2026		Akhir Periode		16	17
							8	9	10	11	12	13	14	15		
1.05.0 2.2.02 .01	Terlaksananya Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha	Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha	12	70	2.086.492.400	75	2.295.141.640	80	2.524.655.804	225	<b>6.906.289.844</b>	Satuan Polisi Pamong Praja	Kabupaten Lumajang
1.05.0 2.2.02 .02	Terlaksananya Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Pengawasan Atas Kepatuhan yang Dilaksanakan Terhadap Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	12	15	66.278.000	18	72.905.800	20	80.196.380	53	<b>219.380.180</b>	Satuan Polisi Pamong Praja	Kabupaten Lumajang
1.05.0 2.2.02 .03	Terlaksananya Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan	Laporan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan	12	20	1.303.440.000	25	1.433.784.000	30	1.577.162.400	75	<b>4.314.386.400</b>	Satuan Polisi Pamong Praja	Kabupaten Lumajang

## T-C.27

1	Sasaran Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan	Capaian awal tahun perencanaan (Tahun 2022)	2024		2025		2026		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
							8	9	10	11	12	13	14	15		
	Bupati/Wali Kota Sesuai SOP	kota	Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP		Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP										Praja	
<b>1.05.02.2.03</b>	<b>Meningkatnya Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota</b>	<b>Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota</b>	<b>persentase Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang terbina</b>	<b>%</b>	<b>jumlah PPNS yang telah dibina di bagi jumlah seluruh PPNS dikabupaten dikali 100%</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40</b>	<b>12.000.000</b>	<b>60</b>	<b>13.200.000</b>	<b>60</b>	<b>25.200.000</b>	<b>Satuan Polisi Pamong Praja</b>	<b>Kabupaten Lumajang</b>
1.05.02.2.03.01	Terlaksananya Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada	Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada	1	0	0	2	12.000.000	3	13.200.000	6	<b>25.200.000</b>	Satuan Polisi Pamong Praja	Kabupaten Lumajang

## T-C.27

1	Sasaran Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan	Capaian awal tahun perencanaan (Tahun 2022)	2024		2025		2026		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
							8	9	10	11	12	13	14	15		
1.05.04	Meningkatnya Upaya Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	%	Jumlah Kebakaran yang ditangani sesuai Tingkat Waktu Tanggap ( Response Time Rate dibagi Jumlah seluruh Kebakaran pada tahun N Jumlah seluruh Kebakaran pada tahun N dikali 100%	70	71	1.377.853.500	71	1.557.816.500	71	1.713.598.150	71	4.649.268.150	Satuan Polisi Pamong Praja	Kabupaten Lumajang
			Persentase cakupan pelayanan penanggulangan non kebakaran dan kondisi yang membahayakan manusia	%	jumlah kejadian non kebakaran dan jumlah kejadian yang membahayakan manusia yang ditangani di bagi jumlah kejadian non	100	100		100		100	-	100	-	Satuan Polisi Pamong Praja	Kabupaten Lumajang



## T-C.27

1	2	3	4	5	6	7	2024		2025		2026		Akhir Periode		16	17
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
					<b>kebakaran dan jumlah kejadian yang membahayakan manusia dikali 100%</b>											
<b>1.05.04.2.01</b>	<b>Terlaksananya Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun dalam Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun dalam Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>persentase penanganan kejadian kebakaran dan penanganan B3</b>	<b>%</b>	<b>jumlah kejadian kebakaran dan B3 yang di tangani di bagi jumlah kejadian kebakaran dan B3 yang dilaporkan dikali 100%</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>1.240.840.000</b>	<b>100</b>	<b>1.375.483.000</b>	<b>100</b>	<b>1.513.031.300</b>	<b>100</b>	<b>4.129.354.300</b>	<b>Satuan Polisi Pamong Praja</b>	<b>Kabupaten Lumajang</b>
1.05.04.2.01.01	Tersedianya Dokumen NSPM yang Berkaitan Dengan Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota Setiap	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/ Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota Setiap	dokumen	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/ Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota Setiap	NA	20	56.090.000	22	61.699.000	25	67.868.900	67	<b>185.657.900</b>	Satuan Polisi Pamong Praja	Kabupaten Lumajang

## T-C.27

1	2	3	4	5	6	7	2024		2025		2026		Akhir Periode		16	17
							8	9	10	11	12	13	14	15		
	Tahunnya		Tahunnya		Tahunnya											
1.05.04.2.01.02	Tersedianya Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	12	60	750.440.000	65	825.484.000	70	908.032.400	195	<b>2.483.956.400</b>	Satuan Polisi Pamong Praja	Kabupaten Lumajang
1.05.04.2.01.03	Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran	NA	12	20.000.000	12	22.000.000	12	24.200.000	36	<b>66.200.000</b>	Satuan Polisi Pamong Praja	Kabupaten Lumajang

## T-C.27

1	2	3	4	5	6	7	2024		2025		2026		Akhir Periode		16	17
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
							8	9	10	11	12	13	14	15		
			dan Non Kebakaran		dan Non Kebakaran											
1.05.04.2.01.06	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	Unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	NA	27	403.000.000	30	443.300.000	35	487.630.000	92	<b>1.333.930.000</b>	Satuan Polisi Pamong Praja	Kabupaten Lumajang
1.05.04.2.01.07	Tersedianya Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis dalam Pencegahan dan Penanggulangan	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis dalam Pencegahan dan Penanggulangan	Orang	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis dalam Pencegahan dan Penanggulangan	21	0	0	40	6.000.000	42	6.600.000	82	<b>12.600.000</b>	Satuan Polisi Pamong Praja	Kabupaten Lumajang

## T-C.27

1	2	3	4	5	6	7	2024		2025		2026		Akhir Periode		16	17
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
							8	9	10	11	12	13	14	15		
	gan Kebakaran		gan Kebakaran		gan Kebakaran											
1.05.04.2.01.08	Tersedianya Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Tahunnya	Desa/Kelurahan	Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Tahunnya	NA	0	0	5	6.000.000	6	6.600.000	11	<b>12.600.000</b>	Satuan Polisi Pamong Praja	Kabupaten Lumajang

## T-C.27

	Sasaran Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan	Capaian awal tahun perencanaan (Tahun 2022)	2024		2025		2026		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.05.04.2.01.09	Tersedianya Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan, dan Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan, dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	NA	3	11.310.000	1	6.000.000	1	6.600.000	5	<b>23.910.000</b>	Satuan Polisi Pamong Praja	Kabupaten Lumajang
1.05.04.2.01.10	Terlaksananya Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	NA	0	0	5	5.000.000	5	5.500.000	10	<b>10.500.000</b>	Satuan Polisi Pamong Praja	Kabupaten Lumajang
<b>1.05.04.2.02</b>	<b>Meningkatnya Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran</b>	<b>Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran</b>	<b>persentase ketersediaan Peralatan Proteksi Kebakaran sesuai</b>	<b>%</b>	<b>Jumlah Peralatan Proteksi Kebakaran yang di inspeksi</b>	<b>NA</b>	<b>100</b>	<b>19.760.000</b>	<b>100</b>	<b>33.736.000</b>	<b>100</b>	<b>37.109.600</b>	<b>100</b>	<b>90.605.600</b>	Satuan Polisi Pamong Praja	Kabupaten Lumajang

## T-C.27

1	2	3	4	5	6	7	2024		2025		2026		Akhir Periode		16	17
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
							8	9	10	11	12	13	14	15		
			<b>standart</b>		<b>sesuai standart dibagi jumlah Peralatan Proteksi Kebakaran yang tersedia dikali 100%</b>										mong Pr aja	
1.05.04.2.02.01	Tersedianya Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memiliki Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	Dokumen	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	NA	0	0	21	12.000.000	21	13.200.000	42	<b>25.200.000</b>	Satuan Polisi Pamong Praja	Kabupaten Lumajang
1.05.04.2.02.02	Tersedianya Dokumen yang Memuat Data Bangunan Gedung Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana	penilaian sarana dan prasaran proteksi kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana	Dokumen	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana	NA	54	19.760.000	54	21.736.000	58	23.909.600	166	<b>65.405.600</b>	Satuan Polisi Pamong Praja	Kabupaten Lumajang

## T-C.27

1	Sasaran Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan	Capaian awal tahun perencanaan (Tahun 2022)	2024		2025		2026		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
							8	9	10	11	12	13	14	15		
	Prasarana Proteksi Kebakaran		Proteksi Kebakaran		Proteksi Kebakaran											
<b>1.05.04.2.03</b>	<b>Meningkatnya Investigasi Kejadian Kebakaran</b>	<b>Investigasi Kejadian Kebakaran</b>	<b>persentase Investigasi Kejadian Kebakaran</b>	<b>%</b>	<b>jumlah kejadian kebakaran yang di investigasi di bagi jumlah kejadian kebakaran di kali 100%</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>3.000.000</b>	<b>100</b>	<b>3.300.000</b>	<b>100</b>	<b>6.300.000</b>	<b>Satuan Polisi Pamong Praja</b>	<b>Kabupaten Lumajang</b>
1.05.04.2.03.01	Tersedianya Dokumen yang Memuat Hasil Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian dan Penelitian	Dokumen	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian dan Penelitian	82	75	0	60	3.000.000	50	3.300.000	185	<b>6.300.000</b>	Satuan Polisi Pamong Praja	Kabupaten Lumajang

## T-C.27

1	2	3	4	5	6	7	2024		2025		2026		Akhir Periode		16	17
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
							8	9	10	11	12	13	14	15		
<b>1.05.04.2.04</b>	<b>Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran</b>	<b>Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran</b>	<b>Persentase Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran</b>	<b>%</b>	<b>jumlah desa/kelurahan yang memiliki relawan pemadam kebakaran di bagi jumlah desa/kelurahan dikali 100%</b>	<b>NA</b>	<b>2,525253</b>	<b>54.597.500</b>	<b>5,0505051</b>	<b>72.597.500</b>	<b>7,5757576</b>	<b>79.857.250</b>	<b>1000</b>	<b>207.052.250</b>	<b>Satuan Polisi Pamong Praja</b>	<b>Kabupaten Lumajang</b>
1.05.04.2.04.01	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat Setiap Tahunnya	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	Orang	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	NA	0	0	25	30.000.000	30	33.000.000	55	<b>63.000.000</b>	Satuan Polisi Pamong Praja	Kabupaten Lumajang
1.05.04.2.04.02	Tersedianya Dokumen Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam	Desa/Kelurahan	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam	NA	5	44.597.500	5	39.597.500	5	43.557.250	15	<b>127.752.250</b>	Satuan Polisi Pamong Praja	Kabupaten Lumajang



## T-C.27

1	Sasaran Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan	Capaian awal tahun perencanaan (Tahun 2022)	2024		2025		2026		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
							8	9	10	11	12	13	14	15		
	Kebakaran di Desa dan Kelurahan Setiap Tahunnya		Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya		Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya										ng Pr aja	
1.05.04.2.04.03	Tersedianya Dokumen yang Memuat SKKL Pada Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sarana dan Prasarana	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana	Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Saprasi Damkar	Orang	Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Saprasi Damkar	NA	50	10.000.000	20	3.000.000	20	3.300.000	90	16.300.000	Satuan Polisi Pamong Praja	Kabupaten Lumajang
1.05.04.2.05	Terlaksananya Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Persentase penanganan kasus kondisi membahayakan manusia	%	jumlah kasus kondisi membahayakan manusia yang tertangani di bagi jumlah kasus kondisi membahayakan	100	100	62.656.000	100	73.000.000	100	80.300.000	100	215.956.000	Satuan Polisi Pamong Praja	Kabupaten Lumajang

## T-C.27

1	2	3	4	5	6	7	2024		2025		2026		Akhir Periode		16	17
							8	9	10	11	12	13	14	15		
					<b>manusia di kali 100 %</b>											
1.05.04.2.05.01	Tersedianya Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia	Laporan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia	85	70	12.706.000	65	13.000.000	60	14.300.000	195	<b>40.006.000</b>	Satuan Polisi Pamong Praja	Kabupaten Lumajang
1.05.04.2.05.03	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan	Unit	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan	NA	19	49.950.000	15	40.000.000	17	44.000.000	51	<b>133.950.000</b>	Satuan Polisi Pamong Praja	Kabupaten Lumajang

## T-C.27

1	Sasaran Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan	Capaian awal tahun perencanaan (Tahun 2022)	2024		2025		2026		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
							8	9	10	11	12	13	14	15		
	Evakuasi yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis	Evakuasi	Manusia/Pe nyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis		Manusia/Pe nyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis											
1.05.04.2.05.04	Terlaksananya Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Pe nyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Pe nyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Pe nyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal	Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Pe nyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal	5	0	0	26	20.000.000	28	22.000.000	54	<b>42.000.000</b>	Satuan Polisi Pamong Praja	Kabupaten Lumajang

## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

#### **1.1 Penentuan target Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2024- 2026**

Penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah. Oleh karena itu, Kepala Daerah memiliki tugas dan tanggung jawab melaksanakan pembangunan untuk kemajuan daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah yang dipimpinnya.

Penetapan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah perlu ditetapkan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan penyelenggaraan pemerintah daerah dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU).. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) pada akhir tahun periode Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2024-2026.

Indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran tersebut ditampilkan dalam T-C 28 berikut ini:

**T-C 28**

**Indikator kinerja utama yang mengacu pada tujuan dan sasaran**

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Formulasi Penghitungan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD (Tahun 2022)	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
						2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Terciptanya Kesiapsiagaan bencana dan rasa aman	indeks resiko bencana	angka	Ancaman x kerentanan di bagi kapasitas	110,73	110,73	109,28	107,86	107,86
		indeks rasa aman	predikat	Hasil Kajian Indeks Rasa Aman	N/A	Aman	Aman	Aman	Aman
2	Meningkatnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Persentase penurunan pelanggaran perda/perkada dan gangguan trantibum	%	Jumlah kasus tahun sebelumnya dikurangi jumlah kasus tahun berjalan dibagi jumlah kasus tahun sebelumnya kali 100%	N/A	1,89	2	2,15	2,15

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Formulasi Penghitungan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD (Tahun 2022)	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
						2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		persentase penurunan bencana kebakaran dan non kebakaran serta kondisi yang membahayakan manusia	%	jumlah kasus bencana kebakaran dan non kebakaran serta kondisi yang membahayakan manusia tahun sebelumnya dikurangi jumlah kasus bencana kebakaran dan non kebakaran serta kondisi yang membahayakan manusia tahun tahun berjalan dibagi jumlah kasus bencana kebakaran dan non kebakaran serta kondisi yang membahayakan manusia tahun sebelumnya dikali 100%	N/A	1,86	1,9	1,94	1,94
3	Meningkatnya Efektifitas dan Efisiensi Pengelolaan Administrasi Umum	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	%	<i>Jumlah Fasilitasi Kebutuhan Operasional Perkantoran yang terpenuhi dibagi jumlah fasilitas Kebutuhan Operasional Perkantoran yang di rencanakan dikali 100%</i>	100	100	100	100	100

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Formulasi Penghitungan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD (Tahun 2022)	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
						2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Meningkatnya upaya penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase penurunan pelanggaran perda/perkada	%	Jumlah kasus tahun sebelumnya dikurangi jumlah kasus tahun berjalan dibagi jumlah kasus tahun sebelumnya dikali 100%	NA	1,92	1,96	1,99	1,99
		Persentase penurunan pelanggaran gangguan trantibum	%	Jumlah kasus tahun sebelumnya dikurangi jumlah kasus tahun berjalan dibagi jumlah kasus tahun sebelumnya kali 100%	NA	1,69	1,72	1,75	1,75
5	Meningkatnya Upaya Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	%	Jumlah Kebakaran yang ditangani sesuai Tingkat Waktu Tanggap ( Respon Time Rate dibagi Jumlah seluruh Kebakaran pada tahun N Jumlah seluruh Kebakaran pada tahun N dikali 100%	70	71	71	71	71

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Formulasi Penghitungan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD (Tahun 2022)	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
						2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Persentase cakupan pelayanan penanggulangan non kebakaran dan kondisi yang membahayakan manusia	%	jumlah kejadian non kebakaran dan jumlah kejadian yang membahayakan manusia yang ditangani di bagi jumlah kejadian non kebakaran dan jumlah kejadian yang membahayakan manusia dikali 100%	100	100	100	100	100



## **BAB VIII PENUTUP**

### **8.1 Kaidah Pelaksanaan**

Kaidah pelaksanaan bermakna aturan atau pedoman dalam pelaksanaan RPD Kabupaten Lumajang Tahun 2024-2026. Tujuan dibuatnya kaidah pelaksanaan adalah menciptakan koordinasi dan keberlanjutan program, sehingga terjadi efisiensi dan efektivitas baik dalam pembiayaan maupun waktu pelaksanaan serta menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Kaidah pelaksanaan RPD Kabupaten Lumajang Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

1. Seluruh Perangkat Daerah atau unit kerja yang ada di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang, agar melaksanakan program dalam RPD Kabupaten Lumajang Tahun 2024-2026 dengan sebaik-baiknya
2. Penjabaran lebih lanjut RPD Kabupaten Lumajang Tahun 2024-2026 untuk setiap tahunnya, disusun melalui Perangkat Daerah Kabupaten Lumajang yang dalam penyelenggaraannya dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
3. Dalam hal pelaksanaan RPD ini terjadi perubahan capaian sasaran tahunan, yang disebabkan karena perkembangan keadaan dalam tahun berjalan, tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran pada akhir periode pembangunan .
- 4.. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan P-RPD Kabupaten Lumajang Tahun 2024-2026, Kabupaten Lumajang berkewajiban untuk melakukan pemantauan, fasilitasi, dan mediasi terhadap penjabaran RPD Tahun 2024-2026, ke dalam Rencana Pembangunan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang.

6. Berkaitan dengan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, RKPD Kabupaten Lumajang merupakan dasar dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS);
8. Indikator kinerja utama dan indikator kinerja daerah, akan menjadi acuan bagi PD yang ada di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang, dalam menjabarkannya menjadi indikator kinerja eselon dan jabatan fungsional, secara berjenjang.
9. Untuk kepentingan evaluasi akuntabilitas kinerja, dapat dilakukan elaborasi antara indikator kinerja per sasaran pembangunan dengan indikator kinerja per urusan pemerintahan daerah, dengan memperhatikan relevansi substansinya.
10. Kaidah pelaksanaan RPD Kabupaten Lumajang Tahun 2024-2026 mencakup poin-poin kaidah pelaksanaan di atas, dengan poin tambahan Poin tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, termasuk indikator dan target untuk tujuan, sasaran dan program dalam RPD ini, harus dijabarkan ke dalam kerangka kinerja PD yang tertuang dalam RPD tahun 2024-2026.

Rencana Pembangunan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang Tahun 2024-2026 ini sudah dilakukan revisi dengan menyelaraskan hasil revisi RPD Kabupaten Lumajang Tahun 2024-2026 dan amanat peraturan perundangan lainnya. Rencana Pembangunan ini merupakan dokumen perencanaan yang akan memandu pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang dalam satu tahun.

Rencana Pembangunan disamping sebagai dokumen perencanaan, juga dapat dijadikan sebagai acuan tolak ukur

kinerja tahunan, dimana keberhasilan pelaksanaan tugasakan dibandingkan dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya.

Lumajang, Mei 2023  
Plt. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN LUMAJANG

SUNARDI, MP.  
NIP. 19651201 1989

